

BAB IV

KEUNTUNGAN TURKI DALAM KERJA SAMA PENANGANAN IMIGRAN DENGAN UNI EROPA

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan analisis dari kesepakatan antara Turki dan Uni Eropa dalam penanganan imigran pada Maret 2016 dengan Model Aktor Rasional. Model ini berpendapat bahwa kebijakan luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama pemerintahan yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang didapat dari kebijakan tersebut.

Kesepakatan yang resmi dijalankan pada 20 Maret 2016 ini berisi sembilan butir kesepakatan. Sembilan butir kesepakatan yang telah disepakati oleh Turki dan Uni Eropa ini meliputi :

1. Pernyataan perlindungan pengungsi yang terdaftar di Uni Eropa
2. Mekanisme pengembalian pengungsi dari Yunani ke Turki

Pada poin ini menyatakan siapa pun tiba secara ilegal di Yunani setelah 20 Maret akan dikirim kembali ke Turki jika aplikasi suaka mereka ditolak, atau jika mereka gagal untuk menerapkan sama sekali. Uni Eropa mengatakan bahwa orang ditemukan “membutuhkan perlindungan internasional” akan diterima jika mereka mengajukan permohonan suaka melalui jalur resmi. Dalam pertukaran untuk setiap orang kembali, Uni Eropa akan memukimkan kembali satu pengungsi Suriah terjebak di

kamp-kamp di Turki. Prioritas akan diberikan kepada orang-orang yang sebelumnya tidak mencoba memasuki Uni Eropa secara ilegal.

Uni Eropa telah mengatakan kesepakatan itu bertujuan untuk memperlambat terkendali, berbahaya dan mematikan orang perjalanan telah menjalani untuk mencapai daratan Eropa. Sebuah pernyataan dari Uni Eropa yang disebut kesepakatan “tindakan sementara dan luar biasa yang diperlukan untuk mengakhiri penderitaan manusia dan memulihkan ketertiban umum” (Reporter, 2016).

3. Turki yang akan memproteksi jalur pengungsi ke Uni Eropa
4. Pendaftaran pengungsi oleh Uni Eropa
5. Liberalisasi visa Uni Eropa untuk masyarakat Turki dengan bersyarat
Hal ini maksudnya Turki meminta akses bebas visa bagi warganya ke wilayah Schengen dengan paspor bebas Uni Eropa dalam pertukaran untuk konsesi Ankara dalam menangani situasi pengungsi (Shtrauchler, 2016). Ini akan dipenuhi ketika Turki memenuhi 72 persyaratan tentang segala sesuatu dari ketertiban umum dan manajemen migrasi. Ini juga untuk membawa paspor yang sesuai dengan standar Uni Eropa. Kesepakatan itu ditawarkan dengan imbalan Turki mengambil kembali migran yang menyeberangi Laut Aegea ke Yunani.
6. Pengalokasian dana 3 Milyar Euro kepada Turki untuk pemenuhan fasilitas pengungsi
Para pemimpin Uni Eropa telah menjanjikan dana senilai tiga milyar Euro kepada Turki, untuk membantu para pengungsi Suriah. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengungsi meninggalkan Turki dan

menuju ke Eropa. Namun, PM Turki Davutoglu mendesak “langkah konkrit” Uni Eropa untuk membantu Turki dalam masalah krisis pengungsi. Ia bahkan mengatakan tidak akan meminta Merkel dana yang telah dijanjikan: “Kami tidak meminta uang, kita tidak bernegosiasi soal dana ... Bagi kami, itu adalah tugas kemanusiaan, karena masalahnya bukan soal keuangan,” kata Davutoglu dalam komentar yang dilaporkan oleh kantor berita AFP (ap/ml, 2016). Meski Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengejek angka janji bantuan Uni Eropa ini yang dinilainya terlalu rendah (ap/as, 2016).

7. Kerja sama Turki-Uni Eropa terkait Unit Bea Cukai

Pada tanggal 31 Desember 1995, melalui putusan Dewan Ec-Turki melaksanakan Kesatuan Pabean antara Turki dan Uni Eropa. Barang-barang yang masuk ataupun keluar dari Turki tidak dikenakan bea dan cukai. Dengan Turki menerima protokol serikat pabean ini akan memberi Uni Eropa kekuasaan untuk memanipulasi hubungan luar negeri Turki. tidak melakukan perjanjian dengan negara non-Uni Eropa tanpa sepengetahuan Uni Eropa. Turki juga berarti tanpa syarat menerima untuk membuat undang-undang yang sejajar dengan hukum baru yang dibuat untuk serikat pabean oleh Uni Eropa (Countries and regions Turkey, 2016).

8. Percepatan proses aksesi Turki dalam keanggotaan Uni Eropa dengan membuka bab 33

Yang dimaksud bab 33 adalah *Copenhagen Criteria* pada bab yang membahas mengenai aturan mengenai sumber keuangan yang diperlukan untuk membiayai anggaran Uni Eropa (sumber daya sendiri). Ulasan sumber ini terdiri terutama dari kontribusi dari negara berdasarkan sumber daya sendiri dari kebiasaan dan pertanian dan *sugar levies*; sumber daya berdasarkan pajak pertambahan nilai; dan sumber daya berdasarkan tingkat pendapatan nasional bruto. Negara harus memiliki kemampuan administrasi yang tepat untuk cukup mengkoordinasikan dan Pastikan perhitungan yang benar, koleksi, pembayaran dan pengendalian sumber daya sendiri (Chapters of the *acquis*).

9. Uni Eropa akan membantu Turki dalam memperbaiki kondisi di wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah konflik Suriah di Turki

Assoc. Prof. Dr. Alexander Bürgin yang seorang Jean Monnet *chair* dan professor di İzmir University of Economics menyatakan bahwa :

The plan is also beneficial for Turkey. Beyond the 6 billion euros of financial aid for the support of the refugees in Turkey (double the amount of what had been agreed to at another EU-Turkey summit in November 2015), Ankara is asking for the abolition of the EU visa duty on its citizens and a revival of the accession process. Some media in the EU have described these demands as too high a price to pay. However, the reality is that these demands merely reflect the current agenda. The EU and Turkey started a visa liberalization process in December 2013. It was agreed that once Turkey fulfilled the benchmarks of this visa liberalization roadmap, the EU would lift the visa duty for Turkish citizens. This process may now be considerably accelerated, but nevertheless, it is based on previous agreements.

Similarly, the accession talks with the goal of full membership started in 2005. Therefore, a revival of the stagnating accession process represents a return to a commitment given more than a decade previously, rather than a complete change in direction in Turkey's favor. Some argue that upgrading Turkey's relationship with the EU is undeserved due to Ankara's (increasing) deviation from the EU's

political values. However, from the EU viewpoint, the opening of new negotiation chapters will allow it renewed influence on Turkish domestic politics.

Dalam tulisannya, Prof Alexander menyatakan bahwa pengungsi yang nantinya berpindah tempat dari Turki ke Uni Eropa dipastikan akan sedikit. Selain itu, rencana tersebut juga bisa berfungsi bahkan jika beberapa negara Uni Eropa memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam rencana pemukiman kembali ini. Uni Eropa juga harus membuktikan komitmennya untuk pemukiman pengungsi dari Turki. Langkah tersebut bisa mengekang keberhasilan partai anti-imigrasi di Uni Eropa. Misalnya, pada pemilihan dewan lokal di wilayah Jerman tengah Hesse, anti-imigrasi Partai Alternatif für Deutschland berada di peringkat tiga.

Rencana ini dipandang bermanfaat bagi Turki. Ankara meminta penghapusan bea visa Uni Eropa pada nya warga dan kebangkitan proses akses. Beberapa media di Uni Eropa telah dijelaskan tuntutan ini sebagai harga yang terlalu tinggi untuk membayar. Namun, kenyataannya adalah bahwa tuntutan tersebut hanya mencerminkan agenda saat ini. Uni Eropa dan Turki mulai proses liberalisasi visa pada bulan Desember 2013. Disepakati bahwa setelah Turki memenuhi tolok ukur visa ini liberalisasi *roadmap*, Uni Eropa akan mengangkat tugas visa bagi warga negara Turki. Proses ini sekarang dapat jauh dipercepat, namun demikian, itu didasarkan pada perjanjian sebelumnya.

Demikian pula, pembicaraan akses dengan tujuan keanggotaan penuh dimulai pada tahun 2005. Oleh karena itu, kebangkitan dari proses stagnan akses merupakan kembali ke komitmen yang diberikan lebih dari satu

dekade sebelumnya, daripada perubahan lengkap dalam arah mendukung Turki. Beberapa berpendapat bahwa hubungan upgrade Turki dengan Uni Eropa tidak layak karena meningkatkan deviasi Ankara dari nilai-nilai politik Uni Eropa. Namun, dari sudut pandang Uni Eropa, pembukaan bab negosiasi baru akan memungkinkan diperpanjang pengaruh pada politik dalam negeri Turki.

KTT lain Uni Eropa pada 17-18 Maret akan memutuskan apakah rencana yang disarankan oleh Davutoglu akan diadopsi. Sebuah kesepakatan akan bermanfaat bagi kedua belah pihak, Uni Eropa dan Turki. Selain itu, banyak pengungsi juga bisa memperbaiki situasi mereka karena peningkatan standar dan hak-hak di Turki - dan karena pilihan hukum untuk mencapai Uni Eropa (Bürgin, 2016).

Lalu, pendapat dari Anthony Skinner, *Director* dan *Head of Political Strategy* Verisk Maplecroft :

The reason behind the Turkish president's maneuvers is to force European authorities to take a more accommodating approach to Turkish legislation and practices. Erdogan calculates that Europe needs Turkey more than vice-versa, given the threat of a renewed deluge of Syrian migrants to EU member states.

But Erdogan is all too aware he would benefit from a successful migrant deal. The lifting of long-standing and humiliating visa restrictions for Turkish nationals would represent one of the government's most significant diplomatic feats to date.

An imminent or freshly-adopted visa deal could help secure the extra votes Erdogan would like for a new constitution. Either through a referendum or following new parliamentary elections later this year, the president is seeking to adopt new legislation which would arm him with full, formal executive powers. Although Erdogan already exercises immense de-facto power, Turkish society is heavily polarised between supporters and opponents of the president.

Aid promised by the EU as part of the migrant deal is also a major factor - especially as Turkey is struggling to foot the bill of 2.75 million registered Syrian refugees. However, the 6 billion euros (\$6.7 billion) in aid promised by the EU will be managed by international NGOs and UN agencies and not Turkey's own national authorities

Alasan di balik manuver presiden Turki adalah untuk memaksa otoritas Eropa untuk mengambil pendekatan yang lebih akomodatif dengan undang-undang dan praktek Turki. Erdogan menghitung bahwa Eropa perlu Turki lebih daripada sebaliknya, mengingat ancaman banjir migran Suriah untuk negara-negara anggota Uni Eropa. Tapi Erdogan terlalu sadar ia akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan migran yang sukses. Pencabutan lama dan pembatasan visa memalukan bagi warga Turki akan menjadi salah satu prestasi diplomatik yang paling signifikan pemerintah untuk saat ini.

Sebuah kesepakatan visa bisa membantu mengamankan penilaian ekstra Erdogan untuk konstitusi baru. Baik melalui referendum atau mengikuti pemilihan parlemen baru akhir tahun ini, presiden berusaha untuk mengadopsi undang-undang baru yang akan mempersenjatai dirinya dengan penuh dalam kekuasaan eksekutif formal. Meskipun Erdogan sudah latihan kekuatan de-facto besar, masyarakat Turki sangat terpolarisasi antara pendukung dan penentang presiden.

Bantuan yang dijanjikan oleh Uni Eropa sebagai bagian dari kesepakatan migran juga merupakan faktor utama - terutama karena Turki sedang berjuang untuk membayar tagihan dari 2,75 juta pengungsi Suriah yang terdaftar. Namun, 6 miliar euro (\$ 6700000000) bantuan yang dijanjikan oleh Uni Eropa akan dikelola oleh LSM internasional dan badan-badan PBB, bukan otoritas nasional Turki sendiri.

Persyaratan Parlemen Eropa untuk Ankara untuk mengikuti kebijakan Uni Eropa dan undang-undang untuk memerangi terorisme dan perlindungan data yang tidak menyenangkan bagi Erdogan. Pemerintah berpendapat bahwa terbatas perlindungan data pribadi untuk kepentingan keamanan nasional dan untuk menjaga ketertiban umum. Sementara Turki jelas menghadapi ancaman lebih akut dari terorisme dari negara-negara anggota NATO lainnya, Erdogan menggunakan undang-undang untuk menangkap kritikus sekaligus memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan.

Bahkan dalam hal kesepakatan migran Uni Eropa runtuh, Erdogan akan memiliki hanya menderita kekalahan parsial yang ia lakukan dalam cat kasus sebagai kemenangan moral dan praktis. pesan presiden diarahkan nasionalis Turki yang akan memainkan peran penting dalam menentukan hasil pemilihan baru atau referendum. Berdiri ke Brussels bersama-sama dengan mengatasi Kurdistan Partai bersenjata Pekerja (PKK) bergema dengan banyak orang Turki.

Paradoksnya, meskipun hanyut semakin menentukan Erdogan jauh dari liberalisme politik, Uni Eropa telah sepakat untuk menyadarkan perundingan akses sebagai bagian dari kesepakatan migran Maret 2016. Kekhawatiran di Turki atas ketidakstabilan dan / atau ekses Erdogan sebagian memperhitungkan dukungan publik yang cukup besar bagi UE. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Realta Penelitian Perusahaan di 18 provinsi pada bulan April 2015 menunjukkan bahwa 61,8 persen dari Turki dukungan publik keanggotaan klub Eropa.

Namun, kesepakatan migran tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa kemungkinan aksesinya Turki ke Uni Eropa telah berkurang selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya karena status Siprus, tekanan ekonomi dan politik di negara-negara anggota Uni Eropa, atau keamanan dan pekerjaan ketakutan Eropa. Juga tidak hanya tentang islamophobia di Eropa. Meskipun hanya *lip service* sesekali, Erdogan telah melakukan sedikit untuk menunjukkan ia tertarik bergabung dengan klub yang undang-undangnya dan konflik norma dengan gaya pribadi pemerintahan (Skinner, 2016).

Sedangkan, John Dalhuisen direktur untuk Eropa dan Asia Tengah di kelompok hak asasi manusia *Amnesty International* menyatakan bahwa masa depan kesepakatan Uni Eropa dan Turki ini jelas sangat banyak dalam keseimbangan. Ankara mungkin akan lebih memilih untuk mempertahankan kesepakatan itu, tetapi pihak berwenang Turki sangat tidak mungkin untuk kompromi pada perjalanan bebas visa. Pertanyaannya adalah apakah pemimpin Uni Eropa siap untuk menawarkan itu meskipun kegagalan Turki untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan. Beberapa tentunya, tetapi sejumlah negara siap untuk menjalankan kesepakatan ini.

Masalah sebenarnya di sini adalah bahwa alternatif yang mereka usulkan, dengan Austria dan Hungaria di garis depan, belum menyiapkan prosedur suaka di Yunani, atau seterusnya di seluruh Uni Eropa., tapi justru sebaliknya. Bahaya nyata saat ini adalah bahwa jika kesepakatan Uni Eropa-Turki jatuh, cadangan untuk mereka yang tidak mampu "karantina" di Turki akan mencari "karantina" mereka di Yunani, dengan harapan bahwa kondisi miskin di sana dan ketidakmampuan untuk bergerak ke seluruh Uni Eropa

akhirnya akan menghalangi pengungsi datang. Logika dari pendekatan ini adalah lemah - dan legalitasnya bahkan lebih - tapi ini adalah debat kebijakan yang pembuktiannya baru bisa dilihat beberapa bulan ke depan. Untuk beberapa hal ini sudah terlihat. Perencanaan darurat berfokus pada membangun pagar baru dan menyebarkan banyak penjaga perbatasan, dan tidak pada peningkatan kondisi penerimaan dan proses suaka di Yunani, yang sudah runtuh di bawah tekanan (Alfred, 2016).

Dengann melihat ketiga analisis di atas, sebenarnya pemerintah Turki memang setuju dengan kesepakatan tersebut beralasan. Para analis lebih banyak berkomentar mengenai mekanisme pengembalian pengungsi ke Turki dari Eropa, bantuan dana dari Uni Eropa, dan permintaan Turki mengenai liberalisasi visa dan negosiasi dalam keanggotaan Uni Eropa. Pada poin poin di atas, poin 1, 2, dan 3 adalah poin yang membahas mengenai mekanisme bagaimana nantinya pengungsi akan dijaga dan dilindungi. Pengembalian pengungsi dari Yunani ke Turki memang akan menimbulkan masalah baru bagi Turki. Turki yang sudah menjadi tempat bagi 2 juta pengungsi dari Suriah sepertinya akan sedikit direpotkan dengan hal ini. Namun, pihak Uni Eropa menjanjikan untuk memberikan 3 milyar Euro untuk pembiayaan fasilitas Turki. Ini juga masih jauh dari cukup mengingat biaya yang dikeluarkan Turki selama ini mencapai 9 milyar dollar US (3 milyar Euro sama dengan 3,1 dollar US).

Sebelumnya disebutkan bahwa pada era Erdogan, politik luar negeri Turki lebih banyak mengarah ke Timur Tengah. Namun, pada akhirnya Erdogan tetap bekerjasama dengan Uni Eropa dalam penanganan imigran. Lalu apa

yang dicari Turki, pada dasarnya Turki mencari peluang akses keanggotaan Uni Eropa yang sudah tertunda selama 30 tahun. Keuntungan yang lain yang diterima Turki adalah pemberian visa Schengen untuk penduduk Turki, dan keterlibatan Uni Eropa dalam ikut menjaga daerah konflik di sekitar perbatasan Turki-Suriah.

A. Peluang Turki Dinegosiasikan Menjadi Calon Anggota Uni Eropa

Dalam *website* resmi pemerintah Turki, pemerintah Turki menuliskan bahwa tujuan strategis Turki adalah menjadi anggota Uni Eropa. Mereka mengatakan bahwa :

“Turkish foreign policy is pursued by mobilizing many and complementary political, economic, humanitarian and cultural means and its sphere of interest has achieved a global scale.

In this framework, Turkey is determined to become a full member of the European Union as part of its bicentennial effort to reach the highest level of contemporary civilization. Furthermore, believing that an ever enlarging NATO has much more to do in serving global peace, Turkey is striving to keep the spirit of alliance high at all times.

On the other hand, attaching particular importance to its Transatlantic ties Turkey is strengthening its relations both with the US and the European countries; while further developing its relations with the countries in the Balkans, Middle East and North Africa, Southern Caucasus, South Asia and Central Asia by making use of its close ties. In a world where globalization renders distances.” (Synopsis of the Turkish Foreign Policy)

Ini menjelaskan bahwa Turki sebagai sebuah negara ingin ikut andil, menghegemoni dalam berbagai bidang dengan negara lain di dunia global. Misalnya dalam bidang politik, ekonomi, kemanusiaan, ataupun budaya. Turki juga menegaskan keinginannya menjadi anggota penuh Uni Eropa untuk mencapai level tertinggi peradaban kontemporer.

Sementara, ketika menengok *progress* keanggotaan Turki di Uni Eropa seperti tidak pernah menemui hasil akhir. Mulai dari Turki yang

mendaftarkan diri dalam kandidat calon anggota Uni Eropa pada 14 Maret 1987 hingga sekarang seperti tidak menemukan titik temu. Berbagai persyaratan makin menambah daftar semakin bertambah saja ketentuan yang diberikan Dewan Uni Eropa. Sampai sekarang Turki memang masih terus mengajukan proposal sebagai anggota Uni Eropa yang dalam jajak pendapat disetujui sekitar 80% rakyat Turki (Soekanto, 2016).

Tabel 4.1
Tabel Tahapan dalam Proses Akses – Perbandingan Komparatif Perspektif Turki

	Spanyol	Austria	Polandia	Turki	Kroasia
Permohonan diajukan	1977	1989	1997	1987	2003
Opini Komisi	1978	1989	1997	1989	2004
Status Kandidat	1978	1989	1997	1999	2004
Perbincangan Akses Dimulai	1978	1993	1998	2005	2005
Perbincangan Akses Berakhir	1985	1994	2003	-	2013
Akses	1986	1995	2004	-	2013

(Sumber : Buku *Turkey and the European Union : A Journey in the Unknown* oleh Nathalie Tocci)

Dalam *website* resminya, Turki menggambarkan Eropa adalah rumah bersama yang saling bersatu di norma-norma umum, prinsip-prinsip dan nilai-nilai. Turki juga menegaskan bahwa mereka saling

mempengaruhi dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Keseluruhan evaluasi sejarah Eropa tidak dapat dibuat tanpa menganalisis peran Turki di Eropa. Turki menjelaskan bahwa sejarah mereka saling terkait satu sama lain. Sehingga, tujuan untuk menjadi anggota Uni Eropa dinilai Turki sebuah pilihan strategis. Turki optimis dengan aksesinya akan meningkatkan ukuran pasar internal Eropa dan memperkuat daya saing relatif Uni Eropa dalam ekonomi global. Turki akan menjadi aset untuk Uni Eropa, dengan lokasi geostrategis, potensi ekonomi yang besar, berpendidikan dan penduduk yang dinamis dan dengan kebijakan luar negerinya visioner dan multidimensi. Aksesinya Turki ke Uni Eropa justru akan membawa nilai tambah bukan beban. Turki juga terus berbenah untuk tujuannya memenuhi syarat keanggotaan penuh. Pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pelembagaan ekonomi pasar bebas dan pembentukan standar kehidupan modern di segala bidang antara dinamika yang paling mendasar dari kebijakan Uni Eropa Turki (Turkey-EU Relations).

Jika melihat dari sejarah politik luar negeri Turki, Perdana Menteri Ismail Cem menerapkan kebijakan luar negerinya pada sekitar tahun 1997, salah satunya adalah memperbaiki hubungan dengan tetangga sebagai prioritas. Dimana Turki akan merespon dengan dua langkah jika satu langkah positif datang dari pihak manapun. Pada akhirnya apa yang dicari Ismail Cem untuk mencapai itu membuat Turki merupakan "bagian integral dari proses integrasi Eropa" dan "untuk mengubah Turki menjadi negara penting dan makmur di pusat [...] Eurasia.

Setelah menangnya Partai AKP pada Pemilu 2002, kebijakan Turki memang lebih pro ke Islam. Namun, keinginan untuk menjadikan Turki sebagai anggota penuh Uni Eropa selalu ada. Salah satu pejabat AKP menyatakan bahwa partai berkomitmen untuk prospek keanggotaan Uni Eropa dan meningkatkan kerjasama regional dan mempertahankan sifat non-partisan dari kebijakan luar negeri tanpa kekhawatiran ideologi atau agama. Professor Ahmet Davutoglu juga menegaskan bahwa Turki harus menjadi “negara pusat” (atau penting) negara dan berargumen mengenai lima prinsip utama. Yang pertama yakni, Kebebasan dan keseimbangan keamanan memungkinkan Turki menjadi negara model; kedua *Zero-problems-with-neighbours*; ketiga kebijakan luar negeri yang multi-dimensi; keempat mengidentifikasi Turki sebagai negara pusat; yang kelima diplomasi yang dinamis (Sezal, 2016).

Ahmet Davutoglu juga menegaskan pada tahun 2009 bahwa integrasi penuh dengan Uni Eropa dan akan tetap prioritas. Keanggotaan di Uni Eropa adalah pilihan strategis Turki dan tujuan ini adalah salah satu proyek yang paling penting dari era Republik. Turki sudah merupakan bagian integral dari Uni Eropa. Kami telah menyelesaikan kesatuan pabean 15 tahun yang lalu dan Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar kami. Dalam kebijakan keamanan, Turki dan Uni Eropa memiliki catatan kerjasama yang luas. Turki adalah non-anggota kontributor terkemuka pada misi ESDP dan operasi dari Bosnia-Herzegovina ke Kongo. Ia juga menegaskan, sejak penunjukannya sebagai Menteri Luar Negeri Mei lalu, ia diutus ke 93 kunjungan ke luar negeri pada tahun 2009, 47-nya ke

ibukota Eropa. Terjalannya hubungan antara Turki dan Uni Eropa tidak hanya tanggung jawabnya sebagai Menteri Luar Negeri, tetapi juga sebagai orang Eropa. Ini untuk mengevaluasi apa yang Eropa akan wariskan kepada anak-anak dan cucu di 2057, abad setelah Uni Eropa memulai sejarah ini (Davutoğlu, 2010).

Dalam tulisannya, Ahmet menjelaskan bahwa Turki dan Uni Eropa tidak dapat dianggap sebagai dua hal yang berbeda, sebaliknya mereka hampir selalu terhubung. Turki berusaha untuk membangun perdamaian, stabilitas dan keamanan di Timur Tengah; untuk lebih mengintegrasikan Balkan dengan komunitas Euro-Atlantik; ataupun untuk mendukung demokrasi dan penyelesaian damai konflik di Kaukasus dan Asia Tengah. Diplomasi proaktif yang dikejar oleh Turki untuk mencapai tujuan tersebut sebenarnya melengkapi kebijakan Uni Eropa untuk tujuan yang sama. Dalam tulisannya, Ahmet menegaskan bahwa antara Turki dan Uni Eropa berbagi geografi yang sama; berbagi visi yang sama; berbagi nilai yang sama: demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum. Dalam 200 tahun terakhir dari sejarah Turki ditandai oleh berbagai perjuangan, baik internal maupun eksternal mengenai modernisasi politik, ekonomi dan sosial. Kedua transformasi di Kekaisaran Ottoman dan para pendiri Turki modern dipengaruhi oleh pilar sejarah Eropa seperti Renaissance, Reformasi, Pencerahan dan Revolusi Perancis. reformasi Atatürk terhadap memperkuat modernisasi Turki adalah konsekuensi dari pola pikir yang revolusioner ini. Berikutnya dalam perjalanan transformasi dan

modernisasi ini adalah keanggotaan Turki di Uni Eropa (Davutoğlu, 2010).

Turki, dalam tulisan Ahmet sudah mengetahui bahwa jalur yang dilalui untuk menjadi anggota Uni Eropa tidak akan mudah. Ahmet menggambarkan bahwa untuk apa yang telah Turki capai untuk memenuhi standar dan norma-norma seperti yang dari Uni Eropa, harus selalu melakukan negosiasi. Tidak ada satu minggu sekali berlalu tanpa pertemuan ahli berlangsung di Brussels, Ankara atau di tempat lain. Ini dikarenakan banyak perundangan yang direvisi untuk menyamakan standar dalam *Copenhagen Criteria*. Di sisi lain, Ahmet juga mengungkapkan sedikit kritiknya pada Uni Eropa dengan menyebut harus berbuat lebih banyak untuk melestarikan kredibilitas dan konsistensi politik Eropa. Ia juga mencantumkan dalam tulisannya “kriteria” yang diminta Turki lebih sedikit. Antara lain, yang pertama Uni Eropa harus mematuhi prinsip *pacta sunt servanda*, yang kedua Uni Eropa seharusnya tidak membiarkan masalah bilateral untuk menahan negosiasi aksesinya dan yang ketiga seharusnya ini tidak membiarkan proses aksesinya Turki dimanipulasi untuk politik dalam negeri (Davutoğlu, 2010).

Dalam sejarahnya, Turki konsisten meletakkan keanggotaan Uni Eropa dalam prioritas dan kebijakan strategis yang ingin dicapai. Sejalan dengan kerja sama antara Turki dan Uni Eropa dalam penanganan imigran. Konflik politik yang dihadapi oleh anggota Uni Eropa dalam menghadapi pengungsi akhirnya berujung pada mengajak Turki untuk bekerja sama.

Sempat menolak, Turki rupanya memang menginginkan keanggotaan Uni Eropa masuk menjadi daftar nilai tukar yang didapat Turki (Wesel, 2016).

Davutoğlu told European leaders that Turkey wanted more for its citizens in exchange for helping the EU. He called for visa liberalisation for 75 million Turks by 1 June, an advance of the October deadline proposed last year, as well as restarting Turkey's long-stalled EU accession talk. (Rankin, 2016).

Dalam persetujuan mengenai penanganan imigran ini pemerintah Turki sebagai aktor rasional melihat adanya peluang untuk keanggotaannya menjadi Uni Eropa yang terbuka. Makan, Perdana Menteri Turki ini menginginkan untuk pembicaraan terhadap akses juga dilaksanakan. Ahmet Davutoğlu perdana Menteri Turki berpendapat bahwa Turki siap bekerja dengan Uni Eropa dengan baik (Refugee crisis: EU and Turkey reach 'breakthrough' deal, 2016).

"It's a historic day today because we reached a very important agreement between Turkey and the EU," Davutoglu said. "Today we realized that Turkey and EU have the same destiny, the same challenges and the same future." (EDT, EU, Turkey seal deal to return migrants, but is it legal? Or doable?, 2016)

Pemerintah Turki juga menegaskan bahwa persetujuan ini sangat penting karena antara Turki dan Uni Eropa menyepakati sebuah perjanjian bersama. Ini juga berarti bahwa Turki dan Uni Eropa memiliki nasib yang sama, tantangan yang sama dan masa depan yang sama (EDT, EU, Turkey seal deal to return migrants, but is it legal? Or doable?, 2016).

Dalam pernyataan *Council of the European Union* pada 18 Maret 2016, ditegaskan bahwa Uni Eropa dan Turki akan melakukan

peningkatan dalam hubungannya dengan Uni Bea Cukai, dan peningkatan komitmen mereka kembali pada proses aksesinya sebagaimana ditetapkan dalam pernyataan bersama mereka 29 November 2015. Mereka menyambut pembukaan Bab 17 pada tanggal 14 Desember 2015 dan memutuskan, sebagai langkah berikutnya, untuk membuka Bab 33 mengenai *Financial and budgetary provisions* saat pemerintahan Belanda di Uni Eropa. Persiapan pekerjaan untuk pembukaan bab lainnya akan terus dengan dipercepat tanpa mengurangi posisi Negara Anggota sesuai dengan aturan yang ada (Relations, 2016).

Sampai sekarang, Turki sudah membuka 16 bab dengan 1 bab yang sudah ditutup. Sehingga, upaya Turki dalam membawa persyaratan untuk membicarakan lagi keanggotaan Uni Eropa dalam kerja sama penanganan imigran dengan Uni Eropa adalah suatu tindakan yang rasional. Hal ini untuk menekan kembali bahwa Turki sudah melakukan berbagai upaya untuk menjadi anggota Uni Eropa sejak dahulu. Dengan menyertakan isu untuk membicarakan lagi keanggotaan Turki dalam Uni Eropa, ini akan menjadi *concern* Uni Eropa dan *me-refresh* kembali tindakan terpenting Uni Eropa jika bekerja sama dengan Turki mengenai imigran.

B. Keuntungan Janji Ekonomi dengan Fasilitas Perjalanan Tanpa Visa (mendapatkan visa Schengen) ke Uni Eropa

Persyaratan visa untuk warga negara Turki sebenarnya telah ada sejak tahun 1980. Para pelamar visa Schengen menggambarkan proses mendapatkan visa sebagai hal yang rumit dan sangat mahal. Sehingga,

ketika warga Turki mendengar mengenai kesepakatan antara Uni Eropa dan Ankara mereka menyambutnya dengan senang. Hal ini dikarenakan mereka bisa berharap pada akhir Juni, mereka dapat memasuki negara-negara anggota Schengen tanpa harus mengajukan permohonan visa. Inilah salah satu tujuan politik utama pemerintah Turki sebagai Perdana Menteri Ahmet Davutoglu. Davutoglu menjelaskan itu mimpi orang-orang Turki yang telah dihargai untuk 50 sampai 60 tahun terakhir. Ini seperti mengangkat rintangan birokrasi yang terjadi di Turki. Lebih dari 90 persen dari Turki yang meminta visa di konsulat Jerman di Ankara, Istanbul dan Izmir diberikan dokumen. Di Istanbul saja, memproses aplikasi membuat staf 30 orang sibuk. Jadi memperkenalkan perjalanan bebas visa yaitu visa jangka pendek yang akan memungkinkan wisatawan untuk menghabiskan maksimal 90 hari dalam jangka waktu 180 hari di wilayah Schengen, tampaknya seperti langkah logis berikutnya. (Shtrauchler, 2016).

Kementerian Luar Negeri Republik Turki sejauh ini secara aktif telah mengangkat isu *non-visa travel for Turkish citizen* dengan Komisi Uni Eropa serta negara-negara anggota Uni Eropa baik di *platform* multilateral dan bilateral. Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan sebagai negara kandidat negosiasi *Customs Union* dengan Uni Eropa sejak Januari 1996 serta beberapa hak yang diperoleh berasal dari Protokol Tambahan antara Komunitas dan Turki, warga Turki harus menikmati perjalanan bebas visa ke Uni Eropa sejak lama. Turki juga telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi ketentuan Uni Eropa untuk visa perjalanan gratis dari warga Turki ke negara-negara Uni Eropa,

seperti yang pertama paspor biometrik; yang kedua label visa dengan standarts ICAO; yang ketiga kemajuan perundingan perjanjian pendaftaran kembali; dan yang keempat praktik visa transit bandara. Lalu juga pemenuhan paspor biometrik yang beredar sejak 1 Juni 2010. Dialog Liberalisasi Visa dengan Uni Eropa diluncurkan pada 16 Desember 2013 dan menjadi Perjanjian, yang ditandatangani pada hari yang sama dan mulai berlaku sejak 1 Oktober 2014 dan upaya menuju terwujudnya liberalisasi visa terus dilanjutkan (Questions).

Pada tahun 2014 the *European Union Commission* mengeluarkan laporan pada liberalisasi visa Turki. Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Turki, Stefano Manservigi menyatakan bahwa upaya Turki termasuk “efektif” untuk memenuhi kebutuhan blok yang memungkinkan warga Turki untuk melakukan perjalanan ke Uni Eropa tanpa visa. Manservigi mengatakan bahwa laporan itu dinilai kemajuan Turki dalam cara yang sangat positif. Manservigi pada tahun 2014 memberikan respon positif terhadap upaya Turki untuk mendapatkan bebas visa tersebut. Bahkan, Manservigi menyatakan hal ini bisa dipenuhi Turki dalam waktu dua tahun. Laporan kemajuan pertama Uni Eropa pada *roadmap* visa mengakui kemajuan Turki dalam mengembangkan sistem pencatatan sipil dan reformasi yang diadopsi di bidang migrasi dan perlindungan internasional. Menteri Uni Eropa Turki Volkan Bozkir Rabu menyatakan bahwa beberapa persyaratan ini telah dipenuhi sembilan dari 70 persyaratan yang telah dipenuhi secara penuh (EU, Turkey will benefit

from visa-free travel, EU envoy says, 2014). Namun, sampai akhir tahun 2015 keputusan Uni Eropa masih tidak bisa dibaca.

Upaya ini dilakukan kembali pada tahun 2016 dimana pada saat perundingan Turki dan Uni Eropa mengenai penanganan imigran. Turki menginginkan salah satu “nilai tukar” yang ditawarkan adalah perjalanan tanpa visa untuk warga Turki, yang dijanjikan akan dipenuhi Uni Eropa pada Juni mendatang. Ini juga tercantum pada pernyataan *Council of the European Union* pada 18 Maret 2016, disebutkan di sana bahwa pemenuhan visa liberalisasi *roadmap* akan dipercepat pun juga ke semua Negara Anggota dengan maksud untuk mengangkat persyaratan visa bagi warga negara Turki paling lambat akhir Juni 2016, asalkan semua persyaratan telah dipenuhi. Untuk itulah Turki harus mengambil langkah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang tersisa yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh Komisi dan penilaian yang diperlukan sesuai dengan aturan sehingga proposal bisa dibahas pada akhir April oleh Parlemen Eropa dan Dewan dan dapat membuat keputusan akhir (Relations, 2016). Turki harus memenuhi 72 kondisi atau syarat agar perjalanan ke Uni Eropa tanpa visa untuk warga Turki bisa terpenuhi. Syarat tersebut salah satunya adalah lewat kebijakan visa ketat untuk mengurangi migran dari negara lain.

Pemenuhan ini masih menggantung dan kontroversial bagi elit Uni Eropa untuk bisa dipenuhi sampai pada Oktober 2016. Namun, dalam pandangan Ayhan Zeytinoglu, anggota dewan direksi dari Turki *American Chamber of Commerce* mengatakan bahwa :

“In all public opinion polls that we conduct, we see that the visa issue affects people’s views. Our people have very bad feelings as far as the current visa regime is concerned. It is symbolic. It will be significant for the government to be able to say it was able to lift the visas and it will have a big political importance”. (Silva, 2016)

Ia menegaskan bahwa Turki awalnya akan berjuang untuk memenuhi kondisi yang dipersyaratkan dalam perjanjian, tapi perubahan mengenai visa sebenarnya akan meningkatkan hubungan antara Eropa dan Turki, hal ini seperti larangan yang diangkat. Dalam semua jajak pendapat umum yang dilakukan oleh Turki, terlihat bahwa masalah visa mempengaruhi pandangan orang. Orang-orang kami memiliki perasaan yang sangat buruk sejauh rezim visa saat yang bersangkutan. Ini adalah simbol yang menjadi penting bagi pemerintah untuk dapat mengatakan mampu mengangkat mengenai masalah visa dan akan memiliki kepentingan politik yang besar (Silva, 2016).

Ayhan Zeytinoglu juga mengatakan bahwa harusnya permasalahan visa ini tidak perlu dikhawatirkan akan menyerang zona Schengen. Hal ini karena 78 juta orang tidak akan pergi ke Eropa hanya satu malam dan tidak semua orang bahkan pemegang paspor di Turki. Zeytinoglu juga menambahkan bahwa mereka yang tidak memiliki paspor tiba-tiba akan berkata, “Aku akan mendapatkan paspor dan pergi ke Eropa” (Silva, 2016).

Pernyataan persetujuan juga datang dari Egemen Bagis mantan menteri urusan Uni Eropa. Ia mengatakan bahwa orang Turki layak untuk perjalanan dalam Uni Eropa tanpa visa, bukan hanya karena Turki membantu keluar dari krisis pengungsi tetapi karena Turki adalah anggota

dari serikat pabean sejak tahun 1990-an. Egamen juga menambahkan bahwa ia tak terima barang hasil produksi Turki bisa bepergian dengan bebas di dalam Uni Eropa, namun pemilik, produsen dan konsumen dari barang yang sama tidak bisa bepergian secara leluasa ke Uni Eropa (Silva, 2016).

Davutoglu melakukan perjanjian dengan Uni Eropa dalam imigran ini dibatasi pada kondisi tertentu. Pembatasan ini berarti bahwa kekhawatiran warga Turki mendorong ke pasar tenaga kerja Uni Eropa berbondong-bondong atau membebani sistem social itu tidak berdasar. Hal ini ditegaskan oleh Gökay Sofuoglu, ketua Komunitas Turki di Jerman, yang menambahkan bahwa Jerman tidak menarik dalam artian bahwa Turki saat ini menawarkan banyak perspektif ekonomi (Shtrauchler, 2016).

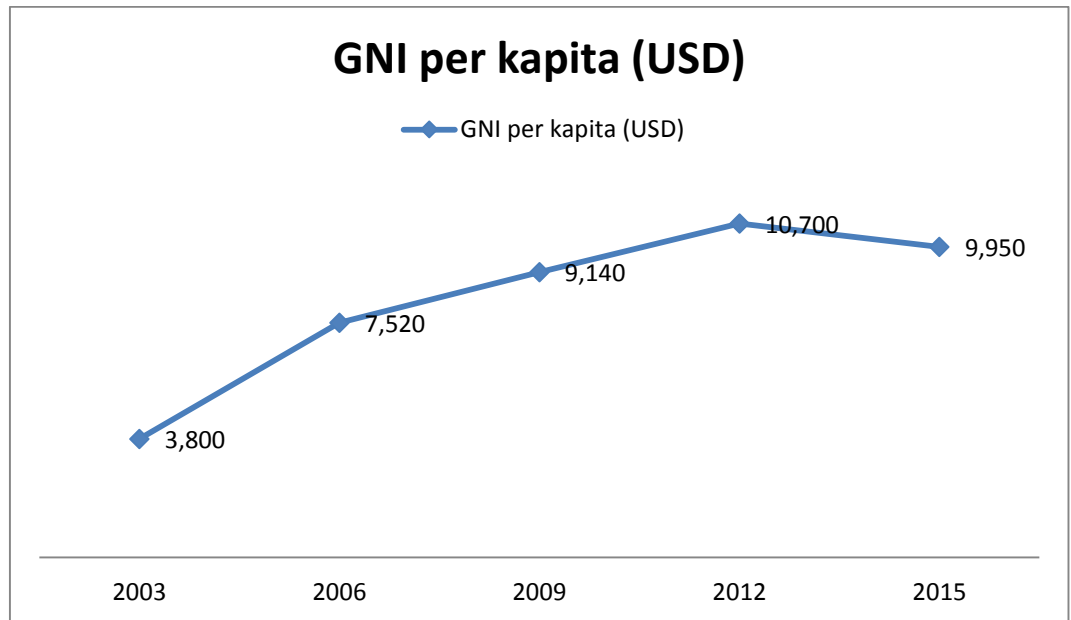
Turki sudah terintegrasi ekonominya dengan pasar Eropa dan selaras pasar domestik dengan aturan perdagangan internasional dan peraturan dengan bantuan Keputusan Uni Bea yang mulai berlaku pada tahun 1996. Bea Cukai Uni dengan Uni Eropa telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan volume perdagangan Turki, dan memberikan kesempatan bagi produsen untuk mencapai pasar berkembang dan konsumen dengan pendapatan tingkat tinggi (Questions). Ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi produsen Turki untuk bisa mengembangkan bisnisnya lebih mudah ke negara- negara Uni Eropa. Upaya ini adalah sesuatu yang normal diupayakan sebuah negara seperti Turki karena hubungannya dengan Uni Eropa yang sudah sejak lama.

Turki ingin agar warganya memiliki hak yang sama sebagai warga negara lain di tepi Eropa. Orang-orang di Turki semakin sulit bepergian dengan mudah dalam Uni Eropa dalam abad kuartal terakhir. Pembatasan tak hanya mempengaruhi pelancong bisnis, keluarga, namun juga mahasiswa, dan para pejabat, memperkuat perasaan mendalam kerenggangan psikologis antara Turki dan Eropa dan kadang-kadang menyebabkan tragedi pribadi seperti misalnya ketika proses visa rumit berarti menunda dari melihat seorang kerabat yang mungkin sedang sakit dan berada di Eropa . Hal ini sebenarnya tidak menjadi perpolitikan yang sulit di negara Eropa lain yang tidak masuk dalam grup Schengen. Namun untuk Turki, visa ini seperti negosiasi yang sulit untuk dicapai (Barchard, 2016).

Efek domino juga akan berlaku ketika visa Schengen ini berjalan. Pemberian izin untuk visa Schengen bagi warga Turki bisa berdampak pada perekonomian Turki yang nantinya akan meningkat dan menuju ke arah kemakmuran negara. Sebagai sebuah negara, Turki termasuk negara yang memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Ini bisa ditunjukkan melalui data dari GNI (*Gross National Income*), dan GDP (*Gross Domestic Product*) Turki. Berdasarkan data dari *World Bank*, besar GNI Turki dari tahun 2003-2015 adalah sebagai berikut :

Grafik 4.1

GNI (*Gross National Income*) Turki (*Atlas Method*)

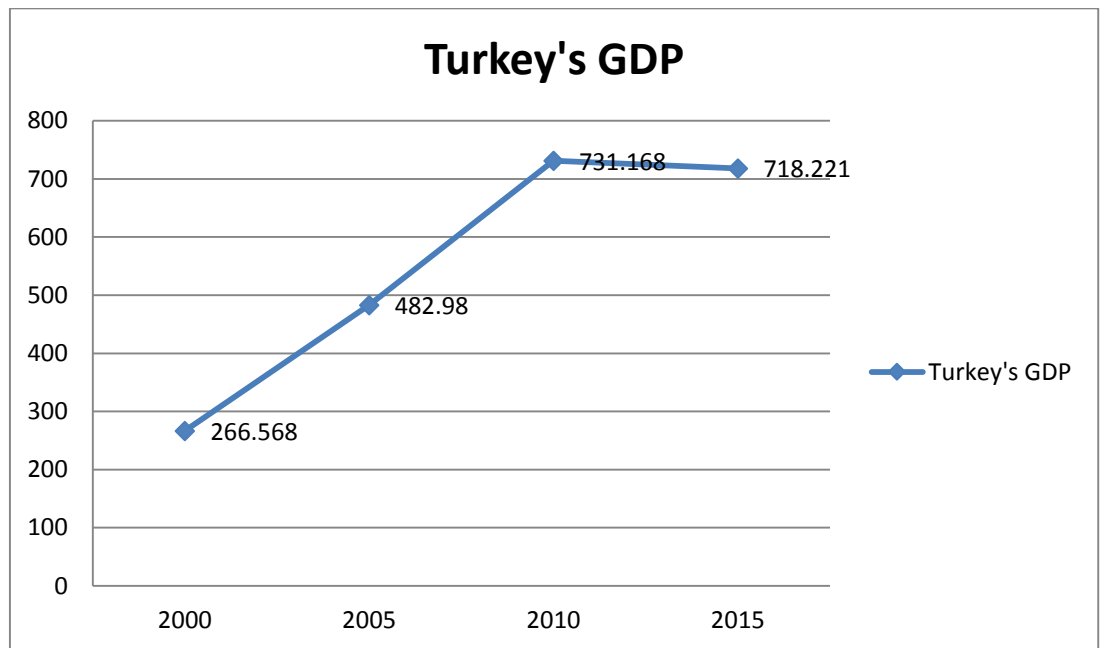


Sumber : diolah dari World Bank

Dalam grafik, GNI per kapita Turki pada tahun 2015 adalah 9,950 USD, sedikit mengalami penurunan dibandingkan pada 2012 yang berada di angka 10,700 USD. Namun, pendapatan per kapita Turki sudah meningkat banyak dibandingkan pada tahun 2003 yang masih di angka 3,800 USD. Turki menempati ranking ke 87 pada tahun 2015 dalam ranking GNI yang dilakukan oleh *World Bank*. Walaupun perekonomian Turki belum termasuk *High Income Economy Country* yang mempunyai standar GNI per kapita nya lebih dari USD 12.475 per tahun. Namun, Turki masih dalam perekonomian yang stabil. Kemudian, data GDP Turki dari World Bank adalah sebagai berikut :

Grafik 4.2

GDP (*Gross Domestic Product*) Turki (dalam miliar USD)



(Sumber : diolah dari *World Bank*)

Dari data GDP Turki tersebut, menunjukkan pada periode 2005 hingga 2010 GDP Turki meningkat hingga sekitar 300 miliar USD dan terlihat stagnan pada periode 2010-2015 di angka 700 miliar USD. Data GDP ini juga sangat berpengaruh dari investasi. Jika pengeluaran investasi berkurang, maka GDP cenderung menurun. Selama ini, Turki melakukan investasi terbesarnya pada Uni Eropa. Jika visa Schengen ini benar-benar dipenuhi oleh Uni Eropa. Maka angin segar untuk investasi yang lebih besar akan terbuka lebar. Pebisnis dan pelaku ekonomi akan mudah untuk bepergian ke negara-negara Uni Eropa dan melakukan lebih banyak transaksi bisnis.

Tabel 4.2
Investasi Turki di Masing-Masing Negara Anggota Uni Eropa

No	Negara	Periode Tahun	Investasi Turki
1.	Belanda	2002-2015	9,2 miliar USD
2.	Jerman	2002-2015	1,9 miliar USD.
3.	Luksemburg	2002-2015	1,1 miliar USD
4.	Malta	2002-2015	1 miliar 237 juta USD
5.	Republik Ceko	Update terakhir : 2015	2,5 miliar USD
6.	Bulgaria	Update terakhir : 2015	2 miliar USD
7.	Irlandia	2002-2015	742 juta USD
8.	Kroasia	Update terakhir : 2015	430 juta US USD
9.	Italia	2002-2015	329 juta USD
10.	Perancis	2002-2015	157 juta USD
11.	Spanyol	2002-2015	143 juta USD
12.	Latvia	2002-2015	62 juta USD
13.	Swedia	2002-2015	36 juta USD
14.	Denmark	2002-2015	22 juta USD
15.	Portugal	2002-2015	13 juta USD.
16.	Finlandia	2002-2015	12 juta USD
17.	Estonia	2002-2015	2 juta USD
18.	Lituania	2002-2015	2 juta USD
19.	Yunani	Update terakhir : 2015	500 juta USD
20.	Rumania	Update terakhir : Akhir 2006	474 juta USD

Sumber : <http://www.mfa.gov.tr/sub.en.mfa?855064bb-a737-421f-b84d-a3024d9c7795>

Data investasi langsung Turki ke negara-negara Uni Eropa ini menunjukkan pada periode 2002-2015 Turki melakukan investasi langsung terbanyak di Negara Belanda. Dengan nantinya Uni Eropa setuju memberikan akses visa Schengen maka investasi ke negara Uni Erop yang lain juga akan terbuka. Misalnya dengan Austria yang GNI per kapitanya sekitar 47,120 USD pada tahun 2015 (Bank, 2016).

Uni Eropa juga menempati peringkat pertama destinasi Turki dalam kegiatan ekspor barang dan jasa Turki. Ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Pasar Ekspor Utama Tahun 2015 Turki

No	Pasar	Juta USD	Share (%)
1	Uni Eropa 28	63,998	44.5
2	Free Zones di Turkey	1,907	1.3
3	Negara lain	77,934	54.2
	a. Negara-negara Eropa yang lain	14,141	9.8
	b. Negara-negara Afrika Utara	8,527	5.9
	c. Negara-negara Afrika yang lain	3,922	2.7
	d. Negara-negara Amerika Utara	7,067	4.9
	e. Negara-negara Amerika Tengah dan Karibia	849	0.6
	f. Negara-negara Amerika Selatan	1,310	0.9
	g. Negara-negara Timur Tengah	31,086	21.6
	h. Negara-Negara Asia yang lain	10,307	7.2
	i. Australia and Selandia Baru	619	0.4
	j. Negara yang lain	106	0.1

Sumber : [http://www.invest.gov.tr/en-](http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorguide/Pages/FDIinTurkey.aspx)

[US/investmentguide/investorguide/Pages/FDIinTurkey.aspx](http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorguide/Pages/FDIinTurkey.aspx)

Pada tahun 2015, Turki mengekspor ke Uni Eropa senilai 63,998 juta USD, dibandingkan dengan di negara Eropa yang lainnya. Dalam tabel, penamaan *Free Zones* di Turki merujuk pada situs khusus yang dianggap berada luar daerah pabean, meskipun mereka berada dalam batas-batas politik negara. Zona ini dirancang Turki untuk meningkatkan jumlah

investasi yang fokus pada ekspor. Ada 19 *Free Zones* Turki yang letaknya dekat dengan Uni Eropa dan pasar Timur Tengah dan berdekatan dengan pelabuhan utama Turki di Mediterania, Laut Aegea, dan Laut Hitam. Untuk lebih jelasnya, bisa terlihat dalam tabel 4.4 yang menunjukkan volume perdagangan Turki dengan negara-negara anggota Uni Eropa :

Tabel 4.4
Volume Perdagangan Turki dengan Negara Anggota Uni Eropa

No	Negara	Periode Tahun	Volume Perdagangan Total
1.	Belgia	2015	5,7 miliar USD
2.	Italia	2011	21,3 miliar USD
3.	Luksemburg	2015	261 juta USD
4.	Perancis	2015	13,4 miliar USD
5.	Denmark	2015	1,7 miliar USD
6.	Irlandia	2011	1,19 miliar USD
7.	Portugal	2011	1,053 miliar USD
8.	Yunani	2015	3,26 miliar USD
9.	Jerman	2015	34,8 miliar USD
10.	Spanyol	2011	10.1 miliar USD
11.	Finlandia	2002-2015	410 juta USD
12.	Swedia	2015	2.8 miliar USD
13.	Republik Ceko	2015	2,97 miliar USD
14.	Estonia	2015	396 juta USD
15.	Hungaria	2015	2,018 miliar USD
16.	Latvia	2015	296 juta USD
17.	Lituania	2015	568 juta USD
18.	Polandia	2015	5,308 miliar USD
19.	Slowakia	2015	1,4 miliar USD
20.	Rumania	2015	5,4 miliar USD
21.	Kroasia	2015	387 juta USD
22.	Malta	2015	520 juta USD
23.	Slovenia	2015	1.15 miliar USD
24.	Belanda	2015	6.1 miliar USD

(Sumber : <http://www.mfa.gov.tr/sub.en.mfa?855064bb-a737-421f-b84d-a3024d9c7795>)

Dalam data volume perdagangan di atas, Jerman menjadi peringkat nomor satu Turki dengan volume perdagangan pada tahun 2015 mencapai 34,8 miliar USD. Data- data perekonomian di atas merupakan bukti bahwa Turki melakukan banyak transaksi ekonominya dengan Uni Eropa. Uni Eropa memberikan banyak keuntungan ekonomi untuk Turki. Ini akan menjadi semakin meningkat ketika visa Schengen itu dipenuhi.

Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui, tak hanya menuntaskan masalah birokrasi terhadap pengajuan visa Schengen di Turki, namun juga mendapatkan keuntungan ekonomi terlihat dari tingginya peran Uni Eropa dalam menyumbang perekonomian Turki. Inilah salah satu alasan mengapa Turki sepakat untuk kerja sama dengan Uni Eropa dalam penanganan imigran pada Maret 2016 .

C. Bantuan Perbaikan Kondisi Perbatasan Turki - Suriah

Seperti yang diketahui bahwa setelah perang saudara di Suriah pecah, para warga sipil Suriah berbondong-bondong meninggalkan negaranya. Turki yang berbatasan langsung dengan Suriah menjadi salah satu negara destinasi para warga sipil Suriah. Kedatangan para warga Suriah di tahun 2011 disambut dengan “*Open Door Policy*” oleh Turki. Turki menyediakan tempat mereka untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, keadaan di perbatasan Turki dan Suriah masih belum aman.

Para warga Suriah yang masih belum berada di Turki sebenarnya mengalami penderitaan karena masih hidup dalam tenda yang kondisinya

tidak layak. Tenda yang mudah roboh jika terkena angin yang agak kencang. Makanan yang mereka makan juga membuat mereka sakit diare. Kebanyakan adalah makanan yang mereka persiapkan sendiri ketika mau menyeberang ke negara lain (EDT, Iraq/Turkey: Open Borders to All Syrian Refugees, 2012).

Di lain pihak, Turki juga menerapkan kehati-hatian setelah sebelumnya banyak penyerangan Suriah yang melebar ke perbatasan Turki. Pada bulan Februari 2012 sebuah bom menewaskan 17 orang Turki di perbatasan Cilvegözü. Pada bulan Mei 2012, dua bom mobil meledak di pusat kota Reyhanlı, dan berjarak hanya 5 km dari perbatasan Cilvegözü persimpangan dengan Suriah, meninggalkan 46 orang tewas dan lebih dari 100 luka-luka. Pada bulan Juni 2012, sebuah jet tempur Turki ditembak jatuh oleh tentara rezim Suriah di Mediterania, dekat perbatasan kedua negara. Dan pada akhir September 2014, tiga orang Turki terluka ketika tembakan mortir mendarat di Suroç di provinsi Şanlıurfa, sebagai Negara Islam (IS) pejuang bentrok dengan pasukan Kurdi di sisi lain perbatasan (Ahmadoun, 2014).

Pada awal 2012, pemerintah Turki yang bekerjasama dengan LSM Turki yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan dalam Suriah menciptakan sebuah sistem yang dikenal sebagai “titik nol pengiriman”. Metode ini diciptakan untuk menghindari pelanggaran kedaulatan nasional Suriah. Mekanismenya dengan cara memberikan pengiriman bantuan ke perbatasan di tempat dimana para pengungsi dijemput oleh para relawan kemanusiaan Suriah (dari dewan lokal atau LSM). Para pengungsi dibawa

ke kamp-kamp perbatasan dalam Suriah, terutama di kamp Atmeh. Pendekatan ini juga berusaha untuk mengurangi masuknya pengungsi ke Turki.

Tetapi, tak hanya pengungsi yang dihadapi Turki di daerah perbatasan Turk-Suriah. Pada bulan November 2012, Turki harus menjaga lebih ketat daerah perbatasan ketika tentara rezim Suriah membom daerah kamp Atmeh. Ini disebabkan kelompok radikal yang mengambil kontrol atas perbatasan, sehingga meningkatkan risiko penculikan pekerja bantuan (Ahmadoun, 2014)

Sebelumnya, pada bulan Februari 2012 sebuah bom menewaskan 17 orang Turki di perbatasan Cilvegozu. Pada bulan Mei 2012, dua bom mobil meledak di pusat kota Reyhanli, dan berjarak hanya 5 km dari perbatasan Cilvegozu persimpangan dengan Suriah, meninggalkan 46 orang tewas dan lebih dari 100 luka-luka. Pada bulan Juni 2012, sebuah jet tempur Turki ditembak jatuh oleh tentara rezim Suriah di Mediterania, dekat perbatasan kedua negara. Dan pada akhir September 2014, tiga orang Turki terluka ketika tembakan mortir mendarat di Suruç di provinsi Şanlıurfa, sebagai Negara Islam (IS) pejuang bentrok dengan pasukan Kurdi di sisi lain perbatasan (Ahmadoun, 2014).

Dengan adanya Uni Eropa ikut menjaga perbatasan wilayah Turki, Turki akan terbantu dalam penanganan konflik di wilayah perbatasan. Uni Eropa yang akan membantu dalam hal penjagaan pengungsi dan

perdamaian akan sedikit membantu Turki menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai.